

---

## Model Komunikasi *Top-Down* dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hikmawati Fajri Devi Safitri<sup>1\*</sup>, Tjut Afrieda Syahara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

\*email: hikmawaa2299@gmail.com

DOI: [10.31603/bcrev.4902](https://doi.org/10.31603/bcrev.4902)

---

### Abstrak

Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses pemberian daya dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Pemberdayaan masyarakat tentunya menjadi upaya pemerintah yang harus diperhatikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan model komunikasi yang terjadi di Jambewangi Indah I, Magelang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder melalui sumber buku, artikel, dan jurnal. Hasil dari pembahasan adalah model komunikasi yang terjadi adalah *top-down* sehingga masyarakat desa hanya menerima jadi kebijakan kelurahan, di mana pendapat atau kebutuhan warga Desa Jambewangi Indah I kurang didengarkan atau diapresiasi.

**Kata-Kata Kunci:** Model Komunikasi *Top-Down*; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Potensi Desa

## *Top-Down Communication Model in Rural Community Empowerment*

### Abstract

*Empowerment is defined as a process of giving power from those who have power to those who are not or less empowered. Community empowerment is certainly a government effort that must be considered. The aim of this research is to describe the communication model that occurs in the Jambewangi Indah I village. The method used is descriptive qualitative with data sources using primary and secondary data. Primary data collection techniques obtained by interviews and secondary data gathered from sources of books, articles, and journals. The result of the research is that the communication model occurred is top-down so that the rural community only accepts it as a policy of exclusion, where the opinions or needs of the residents of Jambewangi Indah I hamlet are not heard or appreciated.*

**Keywords:** *Top-Down Communication Model; Empowerment of Rural Community; Rural Potential*

---



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## 1. Pendahuluan

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Nailufar, 2020). Sedangkan menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Tentunya dalam setiap desa memiliki potensi desa yang dapat dikelola oleh masyarakatnya. (Kementerian Keuangan, 2015).

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut Toto Wardikanto (2013) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Menurut Darmawan (2004) menyatakan bahwa pengelolaan potensi desa merupakan salah satu ciri pemberdayaan diantaranya: (1) prakarsa desa, (2) pemecahan masalah, (3) proses desain program dan teknologi bersifat asli/alamiah, (4) sumber utama adalah masyarakat dan sumber daya lokal, (5) organisasi pendukung dibina dari bawah, (6) pembinaan berkesinambungan, berdasarkan pengalaman lapangan belajar dari kegiatan lapangan dan (7) fokus manajemen adalah kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan. Menurut Anwar (2013), upaya pemberdayaan tersebut tentu memerlukan peran penghubung antara sumber ide perubahan dengan target masyarakat yang diharapkan dapat mengadopsi ide yang ditawarkan oleh produsen ide dan teknologi. (Wahyuni, Kriyantono, & Nasution, 2019).

Pemberdayaan desa bisa dilakukan jika adanya peran dari pemerintah melalui dana desa ataupun program lainnya. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa. Tujuan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga

menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018).

Adanya program dana desa tidak serta merta bisa membuat semua desa merasakan fasilitas tersebut, seperti yang terjadi di Desa Jambewangi Indah I, Secang, Magelang. Jambewangi Indah I merupakan perumahan, di mana terletak di perbatasan Kota Magelang, sehingga peradaban warga perumahan Jambewangi Indah I seperti perkotaan. Untuk akses kebutuhan, masyarakat Desa Jambewangi Indah I lebih dekat ke kota dari pada ke daerah Secang sendiri. Potensi fisik di Jambewangi Indah I memang tidak menonjol, namun bisa diupayakan untuk memberdayakan masyarakatnya pada potensi non fisik. Seperti kegiatan karang taruna yang dahulu sempat dibentuk, namun terhenti karena tidak adanya program pengarahan atau komunikasi yang jelas.

Menurut Deddy Mulyana (2001) model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi. Dalam pandangan Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Oleh karena itu model bisa disebut sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau penyederhanaan teori. Fungsi model komunikasi paling tidak bisa melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kendala komunikasi dalam perspektif teoritik. (Fatimah, Arifin, & Sumpena, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu dengan penulis dan judul berbeda, Siti Fatimah, Isep Zaenal Arifin dan Deden Sumpena dengan judul komunikasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan program keluarga harapan pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi pemberdayaan dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya mensejahterakan keluarga penerima manfaat (KPM) di desa Pasirmuncang, kecamatan Caringin, kabupaten Bogor serta untuk mengetahui model komunikasi pemberdayaan yang digunakan oleh pendamping sosial desa Pasirmuncang, kecamatan Caringin dalam pelaksanaan P2K2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, musyawarah sebagai proses komunikasi pemberdayaan dalam PKH (Program Keluarga Harapan), P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), model komunikasi yang digunakan dalam PKH (Program Keluarga Harapan) P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) adalah model komunikasi dialogis dan persuasif dengan menggunakan pendekatan partisipatoris sehingga adanya kekompakan dan kesetaraan antara pendamping sosial dengan keluarga penerima manfaat, yakni sama-sama sebagai subyek pemberdayaan. Sehingga diantara mereka yang terlibat komunikasi tidak ada perasaan inferior dan superior, dan hasil komunikasinya dianggap sebagai sharing. (Fatimah, Arifin, & Sumpena, 2019).

Yulianti, H. Jamaluddin Hos dan Hj. Ratna Supiyah (2020), yang membahas tentang model pemberdayaan melalui program *day care* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia (Studi Kasus di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan model pemberdayaan lanjut usia melalui program *day care* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa faktor penghambat yang dihadapi pekerja sosial dalam melakukan pemberdayaan lanjut usia melalui program *day care*. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa model pemberdayaan lansia melalui program *day care* yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha dilakukan melalui pelayanan dalam bentuk

bimbingan seperti bimbingan sosial, fisik, mental spiritual, dan keterampilan. Adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan lansia yaitu kondisi fisik lansia, komunikasi, sumber daya manusia, dan sikap ketergantungan lansia (Yulianti, Hos, & Supiyah, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis melakukan penelitian model komunikasi pemberdayaan masyarakat di Desa Jambewangi Indah I dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Pemberdayaan kepada masyarakat di Desa Jambewangi Indah I yang tergolong warga pensiunan, semestinya diberikan pendanaan untuk turut membantu warga kelompok ini, karena mereka adalah usia lanjut, yang hanya mengandalkan gaji pensiunan saja, selain itu beberapa warga di Desa Jambewangi Indah I juga terdapat kelompok janda tua yang hidup sendirian. Itulah mengapa sangat dibutuhkan program yang dapat diajukan dari tingkat bawah RT ke kelurahan. Karena segala sesuatu tanpa adanya dukungan dana sifatnya hanya asal jalan, dan yang perlu dibenarkan adalah sudut pandang Jambewangi Indah I berada di kompleks perumahan yang teratur sehingga perumahan dianggap mampu padahal ada yang tinggal sendiri, sudah purna tapi tidak mendapat perhatian khusus. Maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model komunikasi pemberdayaan masyarakat di Desa Jambewangi Indah I.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Satori & Komariah; 2018 mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat eksploratif dan mendalam dari suatu fenomena atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Sifat eksploratif dan mendalam tersebut ditujukan untuk analisis fenomena yang tidak dapat atau tidak dikehendaki untuk dikuantitatifkan (Wahyudi, 2019). Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dengan tokoh desa. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Jambewangi Indah I, Desa Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Bappenas (2005), dalam merencanakan wilayah dikenal beberapa konsep pendekatan yaitu perencanaan dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang tertuang dalam Undang Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional. Dalam Sururi (2016), perencanaan *top-down* merupakan perencanaan di mana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pendekatan *top-down* relatif minim. Berdasarkan data empiris di lapangan, dalam pelaksanaannya pendekatan tersebut dianggap kurang berhasil, Kholil (2005). Pendekatan *top-down* sering kali terdapat unsur kepentingan di dalamnya sehingga tidak terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebalikan dari *top-down*, *bottom-up* merupakan perencanaan yang berasal dari bawah menuju ke atas. Hjern dalam Ekowati, 2009 menjelaskan bahwa perencanaan *bottom-up* memberikan ruang bagi para implementator untuk dapat menyesuaikan strategi yang

direncanakan dengan kondisi rill yang dihadapi. Pendekatan ini didasarkan oleh dorongan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya sendiri. (Susanti, Suwandono, & Mussadun, 2019).

Perumahan Jambewangi Indah I adalah perumahan berkomplek, dengan dibagi menjadi 4 RT. Dengan lingkup yang tidak begitu luas dan rumah disusun berdempetan secara rapi, sehingga di kawasan perumahan Jambewangi Indah I tidak memiliki ladang atau sawah milik warga. Mayoritas pekerja di Desa Jambewangi Indah I adalah pegawai, PNS, TNI dan pensiunan. Kondisi perumahan Jambewangi juga sangat baik, di mana kebersihan terjaga, jalan perumahan yang bagus, serta keamanan lingkungan yang terkendali. Namun hal seperti ini seolah menjadi pertanyaan heningnya program desa, di mana ketika melihat desa lain memiliki kemajuan dalam mengelola potensi yang dimiliki sedangkan perumahan Jambewangi Indah I minim potensi fisik. Mengingat potensi fisik di Jambewangi, memang tidak ditemukannya tanah yang dapat dijadikan pengembangan potensi desa, terlebih sedikitnya warga Jambewangi berprofesi petani. Namun demikian hal ini tidak lantas menjadikan desa Jambewangi Indah I menjadi warga kota, Jambewangi tetaplah desa yang berada di wilayah kecamatan Secang dan tentunya Desa Jambewangi selalu berkoordinasi dengan kelurahan Secang untuk pengelolaan desa.

Pengelolaan Desa Jambewangi Indah I selalu difokuskan pada perbaikan segala aspek infrastruktur untuk menunjang kenyamanan segala kegiatan di perumahan, namun setelah dilakukannya wawancara dengan ketua RW setempat ternyata ada situasi yang mengganjal dan menjadi permasalahan. Pengajuan dana oleh tiap RT dan kemudian disampaikan oleh RW kepada pihak kelurahan selalu berujung nihil. Dana kelurahan selalu menjadi hal yang tidak bisa dijamin kepastiannya, untuk itulah segala bentuk aspek seperti perbaikan jalan merupakan hasil dari inisiatif warga dengan uang pribadi warga Desa Jambewangi Indah I, selain itu kelurahan juga sempat memberikan sebuah wacana bahwa akan dibangun MCK di Desa Jambewangi Indah I namun sampai saat ini juga tidak ada perkembangan. Setelah dikonfirmasi lebih lanjut Desa Jambewangi Indah I sering dikalahkan dengan anggapan skala prioritas artinya warga perumahan Jambewangi Indah I dianggap mampu, dan dana desa lebih diprioritaskan ke desa yang lebih membutuhkan.

Anggapan mampu oleh kelurahan ini tidak benar adanya, di mana seharusnya dana untuk desa memang harus disalurkan dengan terang untuk mengelola desa, jika hanya anggapan tanpa adanya data itu berarti hanya anggapan semata saja, sedangkan di Desa Jambewangi Indah I sendiri juga memiliki permasalahan yang seharusnya dapat dibantu serta didukung dengan pendanaan desa. Beberapa permasalahan Desa Jambewangi Indah I, yang membutuhkan bantuan dan pengajuan dana kepada kelurahan yakni:

1. Perbaikan irigasi dan selokan

Bagian RT 01 dekat masjid Jambewangi terdapat irigasi sungai, di mana ketika musim penghujan air sering kali meluap dan mengotori jalan desa, selain itu luapan sampah irigasi yang kotor dan bau dapat menimbulkan penyakit jika hal ini dibiarkan saja. Pengajuan pembenaran irigasi sudah sering diajukan ke kelurahan hanya saja lambat respon dan berujung warga yang berinisiatif melakukan gotong royong pembenahan irigasi, hal serupa datang di kompleks RT 03 di mana aliran selokan yang kecil kadang tersumbat dan menyebabkan genangan air saat hujan deras tiba, hal ini juga dapat menimbulkan bibit jentik

nyamuk bila dibiarkan, menunggu kebijakan kelurahan sama halnya menanti penyakit datang, untuk itu warga kembali berinisiatif untuk membenahi selokan dengan mandiri.

2. Pengerasan jalan atau pengaspalan jalan

Pendanaan yang seharusnya diterima tidak berbuah namun berujung pula dengan inisiatif warga. Pada kesempatan kali ini sebenarnya warga sempat mendapat bantuan, itupun dikarenakan adanya relasi RW dengan anggota dewan, dalam artian pengerasan jalan juga tetap tidak mendapatkan pendanaan desa dari kelurahan.

3. Alat penunjang pos jaga dan balai RW

Peralatan penunjang seperti meja kursi, tratag dan kebutuhan kebutuhan warga yang mestinya desa mempunyai fasilitas tersebut yang kemudian bisa dipinjam oleh warga untuk melancarkan segala kegiatan hajjat bahkan ketika berita duka datang, namun hal seperti ini juga tidak menjadi perhatian.

4. Bantuan protokol kesehatan covid-19

Pandemi bukan lagi permasalahan kecil, melainkan pandemi global yang semua orang merasakan, situasi darurat seperti ini bantuan hanya datang sekali dan kemudian tidak lagi dibantu untuk memenuhi segala protokol kesehatan untuk posko covid-19 di Desa Jambewangi Indah I. Warga berinisiatif sendiri untuk terus menjaga lingkungan perumahan agar terlepas dari wabah ini, seperti kebijakan-kebijakan yang diberlakukan RW dengan sistem keamanan diperketat yakni pemusatan satu pintu masuk perumahan, dengan ditetapkannya jam portal dibuka pukul 06.00 dan ditutup pukul 22.00 WIB, selain itu setiap seminggu sekali inisiatif warga yakni melakukan penyemprotan disinfektan dari rumah ke rumah.

Meskipun tidak didukung dengan pendanaan desa, warga Desa Jambewangi Indah I selalu mempunyai inisiatif dan rasa kepedulian untuk kenyamanan bersama. Seperti pada saat ini, segala bentuk dan aktivitas di masa pandemi masih diberhentikan dan tiap warga juga sudah mengupayakan untuk saling menjaga kesehatan dan kebersihan sesuai protokol kesehatan. Kegiatan yang bersifat tatap muka dialihkan menjadi online atau terkoordinasi secara grup *whatsapp*. Selama pandemi berlangsung program yang berjalan di desa ini adalah adanya jam ronda malam untuk menjaga keamanan di masa pandemi, serta penertiban keluar masuk warga lain di luar Desa Jambewangi Indah I, kemudian program keagamaan seperti rutinitas pengajian diubah menjadi online, yakni mengaji Al-Qur'an di rumah masing-masing dengan dikoordinasi melalui grup *whatsapp* sehingga dua hari sekali selalu dilaksanakan doa bersama yakni doa khataman Al-Qur'an.

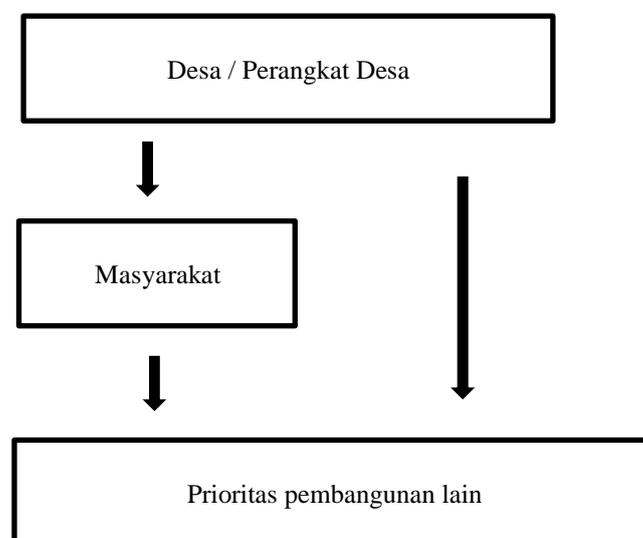
**Tabel 1.** menunjukkan pemberdayaan masyarakat di desa Jambewangi yang masih perlu diperhatikan, yaitu pemberdayaan fisik, non-fisik, sosial dan peran komunikasi. Meskipun bentuk fisik dalam Desa jambewangi Indah I sangat minim namun dapat diberlakukan pemberdayaan dengan program alternatif. Seperti pemberdayaan tanaman hidroponik, atau pemberdayaan lele dalam ember. Melihat potensi non-fisik desa Jambewangi Indah I memiliki pemuda desa yang dapat diupayakan untuk turut membangun kesejahteraan desa yang berkemajuan, namun hal ini menjadi terabaikan karena karang taruna tidak berjalan dengan baik. Untuk itu perlu diberdayakan kembali dalam

menghidupkan karang taruna di Desa Jambewangi Indah I yang sudah lama tidak aktif. Selain dari segi pemuda desa, program baru dan inovasi pemberdayaan juga perlu ditambahkan pada kegiatan masyarakat seperti kegiatan PKK dalam menyejahterakan keluarga. Pemberdayaan sosial perlu didukung dengan transparansi dana desa dari kelurahan yang seharusnya diterima oleh Desa Jambewangi Indah I yang kemudian dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan desa. Salah satunya dalam pemberdayaan sosial masyarakat, seperti sarana prasarana, perbaikan jalan, maupun hal penunjang kegiatan sosial warga desa Jambewangi Indah I. Sebagaimana diketahui warga desa Jambewangi Indah I juga memiliki warga lanjut usia dan pensiunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diberdayakan.

**Tabel 1.** Pemberdayaan Desa Jambewangi Indah I

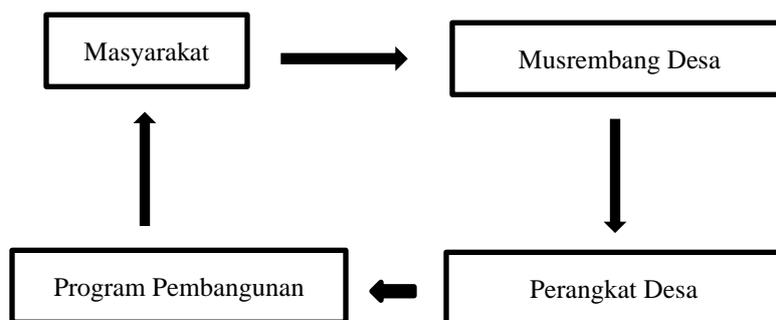
No	Bentuk Pemberdayaan	Bentuk Kegiatan Pemberdayaan
1.	Fisik	Belum ada pemberdayaan fisik
2.	Non Fisik	Pemberdayaan karang taruna, PKK
3.	Sosial	Infrastruktur, sarana prasarana perangkat desa
4.	Peran Komunikasi	Optimalisasi dana desa, pemberdayaan lansia

Peran komunikasi dalam pemberdayaan desa sangat dibutuhkan, di mana dalam hal ini Desa Jambewangi Indah I masih belum mendapatkan keterangan yang valid dalam transparansi dana desa. Dalam kegiatan rapat kekelurahan Desa Jambewangi Indah I selalu dilewatkan dengan alasan perumahan jambewangi sudah dianggap mampu, sudah berjalan baik, sehingga dana desa lebih disalurkan kepada skala prioritas. Namun hal tersebut seharusnya bukan menjadi sebuah alasan tidak adanya penyaluran dana, bahkan warga desa Jambewangi Indah I juga perlu pemberdayaan untuk warga lanjut usia dan pensiunan. Untuk itu peran komunikasi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan warga Desa Jambewangi Indah I. Skema realitas model komunikasi di Jambewangi Indah I disajikan pada **Gambar 1**.



**Gambar 1.** Skema Realitas Model Komunikasi di Jambewangi Indah I

Berdasarkan **Gambar 1**, dapat kita ketahui bahwa model komunikasi yang terjadi di Desa Jambewangi Indah I adalah model komunikasi *top-down*. *Top-down* merupakan perencanaan di mana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Pendekatan *top-down* relatif minim, sering kali terdapat unsur kepentingan di dalamnya sehingga tidak terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Seperti yang diketahui di Desa Jambewangi Indah I aspirasi masyarakat sering kali terabaikan dengan dalih masyarakat Jambewangi dianggap sudah mampu dan pendanaan desa disalurkan kepada skala prioritas atau disalurkan kepada desa lain. Skema ideal model komunikasi di Jambewangi Indah I disajikan pada **Gambar 2**.



**Gambar 2.** Skema Ideal Model Komunikasi di Jambewangi Indah I

Dari skema **Gambar 2**, seharusnya model komunikasi di Desa Jambewangi Indah I berlaku model komunikasi *bottom-up*. *Bottom-up* merupakan perencanaan yang berasal dari bawah menuju ke atas. Perencanaan ini memberikan ruang bagi para implementator untuk dapat menyesuaikan strategi yang direncanakan dengan kondisi riil yang dihadapi sesuai dengan keadaan masyarakat di Desa Jambewangi Indah I untuk diberlakukannya pemberdayaan masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Desa Jambewangi Indah I, masih kurang maksimal dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan model komunikasi yang berlaku sejauh ini adalah penerapan komunikasi *top-down*. Pihak kelurahan dengan tokoh masyarakat tidak terjalin dengan baik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Sebaiknya model komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan kelurahan adalah model komunikasi *bottom-up* di mana segala perencanaan pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat Jambewangi Indah I.

#### Referensi

- Darmawan, Didit. (2004). Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi. Surabaya: Pena Semesta.
- Fatimah, S., Arifin, I. Z., & Sumpena, D. (2019). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Program Keluarga Harapan. *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic*

- Communication and Broadcasting, V, 63-80.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 146-154.
- Kementerian Keuangan, K. (2015, Desember 21). djpk.kemenkeu.go.id. Dipetik Maret 30, 2021, dari djpk.kemenkeu.go.id: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Nailufar, N. N. (2020, Januari 9). kompas.com. Dipetik Maret 30, 2021, dari kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>
- Susanti, R., Suwandono, D., & Mussadun. (2019). Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata Di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. *Jurnal Pasopati*, 1, 41-50.
- Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Yamulia, H. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Pendidikan Ilmu Sosial* , 2-4.
- Yulianti, Hos, H. J., & Supiyah, H. R. (2020). Model Pemberdayaan Melalui Program Day Care Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Kasus Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, I, 16-23.
- Wahyudi, K. E. (2019). Mewujudkan Good Governance dalam Implementasi Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, //, 43-52.
- Wahyuni, N. T., Kriyantono, R., & Nasution, Z. (2019). Pola Komunikasi Pembangunan Terkait Pengelolaan Program Inovasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Heritage*, VIII, 92 - 106.
-